

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tidak dapat dipungkiri pendidikan merupakan salah satu hal penting bagi kehidupan manusia, terlebih guna meningkatkan derajat hidup manusia. Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut pandangan hidup mereka.

Pendidikan juga dirasa sangat penting bagi bangsa yang sedang berkembang seperti bangsa Indonesia. Pendidikan dianggap sebagai kebutuhan mutlak seiring dengan tuntutan pembangunan secara bertahap. Dengan pendidikan yang baik penerus bangsa ini dapat melanjutkan pembangunan dan cita-cita bangsa sehingga dapat menyusul ketertinggalan yang di alami bangsa.

Namun kualitas pendidikan di Indonesia masih harus di tingkatkan bahkan pendidikan Indonesia dapat di katakan sangat memprihatinkan. Saat ini dunia pendidikan Indonesia mengalami tiga tantangan besar; tantangan *pertama*, dunia pendidikan dituntut dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. *Kedua*, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. *Ketiga*, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan

dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Permasalahan lain yang di hadapi dunia pendidikan Indonesia adalah¹:

1. Masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan.
2. Masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan.
3. Lemahnya manajemen pendidikan.
4. Belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi
5. Ketimpangan pemerataan pendidikan antar wilayah geografis dan antar tingkat pendapatan penduduk ataupun antar gender.

Pendidikan tidak terlepas dengan biaya yang harus dikeluarkan. Dalam pasal 31 Amandemen UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan “, dan pada ayat (2) disebutkan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”². Hal yang serupa juga disebut dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) antara lain disebutkan dalam: *pertama*, pasal 5 ayat (1) “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, *kedua*, pada pasal 6 ayat (1) “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. *Ketiga*, dalam pasal 11 ayat (1), “pemerintah dan

¹ *Republika*, 21 Oktober 2005

² *Undang-undang Dasar 1945*, Sendang Ilmu , Solo, 2000, hal 8

pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". Yang *keempat*, pasal 11 ayat (2) "pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun"³.

Janji pemerintah ini sesuai dengan Konvensi Internasional Bidang Pendidikan yang dilaksanakan di Dakkar, Senegal, Afrika, tahun 2000. Konvensi menyebutkan, semua negara diwajibkan memberikan pendidikan dasar yang bermutu secara gratis kepada semua warga negaranya.⁴

Mengacu pada pasal 31 Amandemen UUD 1945 ayat (1) dan (2), serta UU SPN no 20/2003, dan kesepakatan dalam Konvensi Internasional Bidang Pendidikan di Dakkar tahun 2000, masyarakat bisa mempunyai persepsi bahwa pendidikan dasar yang diwajibkan oleh pemerintah itu gratis atau tanpa biaya tambahan apapun.

Akan tetapi pada kenyataannya, siswa masih dikenai berbagai pungutan, hal ini terjadi baik di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Pemberian subsidi biaya oleh pemerintah tidak serta merta menggratiskan pendidikan bagi warga. Program pemberian subsidi biaya minimal pendidikan dasar yang diterapkan pemerintah dapat menimbulkan dua macam kekecewaan bagi masyarakat. *Pertama*, sebagian masyarakat yang sudah terlanjur berharap pada pendidikan gratis untuk anak usia 7 sampai dengan 15 tahun akan kecewa karena ternyata orang tua murid masih tetap

³ UU Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003, Fokusmedia, 2003, hal 8-9

⁴ Kompas, Kamis 5 Agustus 2004

membayar iuran pendidikan. *Kedua*, orang tua murid terutama dari kalangan keluarga miskin makin terbebani dengan berbagai biaya tambahan mulai dari seragam, buku pelajaran, darma wisata dan sebagainya. Dan jika siswa tidak mampu membayar berbagai biaya tambahan tersebut, maka terancam lah kesinambungan pendidikannya.

Suatu hal yang nyata bahwa peran serta pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di rasa sangat kurang, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan yang sangat menonjol. Di dalam GBHN tahun 1999-2004 dinyatakan arah pembangunan pendidikan Indonesia yang secara tidak langsung menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara dari kesejahteraan rakyatnya, arah pembangunan tersebut antara lain adalah:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- c. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai

dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.

- d. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
- e. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- f. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- g. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.
- h. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam usaha,

terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.⁵

Saat ini telah banyak berdiri sekolah-sekolah swasta dengan fasilitas yang memadai, sistem pengajaran yang berbeda, dan tentunya biaya yang sangat mahal. Sekolah macam ini hanya bisa dinikmati oleh siswa-siswi dari kalangan kelas menengah keatas yang kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa pendidikan yang bermutu harus dibayar dengan harga mahal. Sedangkan untuk siswa-siswi dari keluarga miskin terpaksa mencari sekolah-sekolah yang serba minimalis dari masalah biaya yang harus dikeluarkan termasuk sarana prasarannya. Walaupun siswa-siswi dari keluarga miskin tersebut telah mendapatkan subsidi dari pemerintah, namun mereka tidak mampu menanggung biaya tambahan yang harus di keluarkan demi memenuhi biaya operasional pendidikan.

Anggaran pendidikan yang di berikan pemerintah tiap tahunnya mengalami kenaikan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan tahun 2003 dalam pidato kenegaraan pada tanggal 15 Agustus 2003 di tetapkan ± Rp 15,2 trilyun (yang berarti hanya 4,12% dari anggaran pendapatan negara sebesar Rp 343,9 trilyun dan anggaran belanja negara yang sebesar Rp 368,8 trilyun)⁶, sedangkan dalam komitmen yang telah di sepakati antara pemerintah dan DPR anggaran pendidikan tahun 2004 adalah 6,6 % (Rp 16,8 triliun), dan untuk tahun 2005 mengalami

⁵ Azril Azahari, *Reformasi Sistem Pendidikan Menuju Indonesia Baru*, Jurnal Dikbud No. 025, September 2000, hal 348-357

⁶ *Kompas*, Kamis 5 Agustus 2004

peningkatan menjadi Rp 21,585 triliun atau sekitar 8 % dari total APBN.⁷ Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap bidang pendidikan sudah lebih baik. Akan tetapi dengan anggaran pendidikan yang telah ditetapkan tersebut belum bisa menurunkan biaya pendidikan yang mahal serta belum bisa membuat seluruh warga negara ini menikmati pendidikan.

Dengan biaya pendidikan yang sangat tinggi menyebabkan sebagian orang tua siswa terpaksa memutuskan untuk tidak menyekolahkan anaknya. Anak-anak kemudian disibukkan dengan bekerja membantu orang tuanya guna menambah penghasilan keluarga. Hal yang demikian ini merupakan faktor utama penyebab prosentase angka anak putus sekolah di Indonesia cukup tinggi. Di Indonesia terdapat 6 juta anak terlantar, 50.000 anak jalanan di 12 kota propinsi dan diperkirakan meningkat 100 % akibat krisis, ditambah lagi dengan jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun sekitar 2,1 juta orang. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak putus sekolah dan bahkan tidak mengenyam pendidikan. Diperkirakan terdapat 1 juta anak putus sekolah setiap tahunnya di Indonesia⁸. Sebanyak 11,7 juta anak tidak pernah sekolah dan putus sekolah berumur antara 10-14 tahun dan sebanyak 5,2 juta anak usia sekolah tidak mampu membaca, menulis, dan berhitung⁹. Dari data yang dihimpun Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan sensus nasional 2002/2003, menunjukkan angka putus sekolah pada SD sebesar 1,46 persen, putus sekolah di tingkat SLTP/MTs 2,27

⁷ *Republika*, 21 Juli 2005

⁸ *Republika*, 5 Februari 2002

⁹ *Republika*, 16 Agustus 2002

persen, sedangkan tingkat SLTA mencapai 2,48 persen. Di sisi lain, masih ada 283.990 anak dari 21.678.643 anak yang buta aksara¹⁰. Dan pada tahun 2004/2005 seperti yang diungkapkan Direktur Pendidikan Masyarakat Eko Djatmiko, misalnya, menunjukkan angka putus sekolah pada tingkat SD dan madrasah ibtidaiyah (MI) masih berada pada angka 685.967, sedang pada tingkat SLTP mencapai 263.793¹¹.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di sebelah selatan Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang menjadi tujuan pendatang untuk menikmati wisata yang ditawarkan. Selain itu Yogyakarta yang diidentikkan sebagai kota pelajar dan mempunyai sarana prasarana belajar yang lengkap menjadi salah satu kota yang diminati untuk menimba ilmu, akan tetapi di balik hal tersebut tingginya angka putus sekolah di Propinsi DIY masih menjadi hal yang harus segera ditanggulangi.

Pada tahun 2003-2004 angka putus sekolah di Propinsi DIY untuk jenjang SD mencapai 0,16 % dari 306,355 siswa yang berarti adalah 490 siswa, sedang untuk jenjang SMP dengan prosentase 0,40 % dari 143,542 siswa yang berarti 574 siswa, dan untuk jenjang SMA mencapai angka 118 siswa atau 0,90 % dari 128,167 siswa. Tahun 2004-2005 tercatat 580 siswa atau 0,19 % dari 305,182 SD putus sekolah dan pada jenjang SMP terdapat 0,51 % dari 146,312 siswa yang berarti 746 siswa putus sekolah, sedang jenjang SMA tercatat 1275 siswa atau 1,02 % dari 124,990 siswa yang mengalami putus sekolah.

¹⁰ *Suara Pembaharuan*, 12 Juni 2003

¹¹ *Suara Karya*, 16 November 2005

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa angka putus sekolah terbesar terjadi pada jenjang pendidikan SMA, disusul tingkat SMP dan jenjang SD pada urutan terakhir. Banyaknya kasus putus sekolah yang terjadi disebabkan karena banyak faktor sehingga bukan hanya tindakan dari pemerintah tetapi juga peran serta masyarakat luas dalam mengatasi masalah putus sekolah.

Dengan tingginya angka anak putus sekolah tersebut menimbulkan kekhawatiran baru bahwa generasi penerus bangsa minim pendidikan bahkan hal ini dapat menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya, seperti tingkat kriminalitas yang meningkat, prostitusi, kenakalan remaja, dan bertambahnya angka anak jalanan.

Dinas Pendidikan yang berperan secara langsung dalam sistem pendidikan mempunyai peranan dalam menanggulangi masalah putus sekolah yang terjadi. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan fasilitator kebijakan pemerintah mempunyai tugas pokok sebagai pengendali pendidikan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan putus sekolah dengan maksimal, mengingat masih banyaknya SDM (Sumber Daya Manusia) dengan kualitas baik yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan daerah. Beberapa strategi harus dimiliki oleh Dinas Pendidikan Propinsi DIY dalam mengatasi permasalahan putus sekolah dan dari strategi yang dijalankan tersebut diharapkan adanya perbaikan mutu pendidikan dan penurunan angka putus sekolah khususnya di Propinsi DIY serta peningkatan kualitas pendidikan. Namun dalam pelaksanaan strategi tersebut juga terdapat kendala-kendala yang menghambat dalam

pencapaian hasil yang optimal. Bagaimana Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi permasalahan kompleks yang timbul ini merupakan hal yang akan menjadi kajian penulis dalam penelitian ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari penjabaran latar belakang di atas dapat di tarik suatu rumusan masalah berupa:

1. Apa yang menjadi kelemahan, kekuatan, peluang serta ancaman dalam kinerja Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Isu strategis apa yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Propinsi DIY dalam penanggulangan masalah putus sekolah ?
3. Strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi DIY dalam penanggulangan masalah putus sekolah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan di lingkungan internal serta mengetahui peluang dan ancaman di lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
2. Untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Propinsi DIY dalam penanggulangan masalah putus sekolah.
3. Merumuskan strategi yang harus ditempuh oleh Dinas Pendidikan Propinsi DIY dalam penanggulangan masalah putus sekolah.

4. Merupakan tugas akhir dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi instansi yang menjadi objek penelitian (Dinas Pendidikan) diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam menanggulangi masalah putus sekolah.
2. Bagi penulis dapat memperluas wawasan dan dapat berlatih menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah serta dapat memperdalam pengetahuan tentang strategi penanggulangan masalah putus sekolah yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep definisi tertentu. Didalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang dilakukan.

Teori dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga permasalahan yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan yang telah di tentukan. Pada dasarnya landasan teori digunakan untuk mengkaitkan masalah-masalah atau variabel-variabel yang ada dalam suatu penelitian.

Menurut Sofian Efendi, teori merupakan unsur penelitian yang paling penting peranannya bagi penelitian karena unsur inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial dan fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya . Menurut F.N. Kerlinger lebih jauh mengemukakan bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹²

1. Konsep Strategi

Pengertian strategi menurut Stephanie K. Marrus sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut Hamel dan Prahalad, definisi strategi adalah sebagai berikut: “Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.”¹³

¹² Masri Singarimbuan dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* , LP3ES, Jakarta, 1995, hal 37.

¹³ Umar Husein, *Strategic Management In Action: Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis, Strategic Business Unit Berdasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. David dan Wheelen-Hunger*, PT. Gramedia, Jakarta, 2002, hal 31

Strategi menurut Chandler Jr ialah:

“Strategy can be defined as the determination long term goals and objectives of an enterprise an adaption of coourses of action and allocation resources for carrying out these goal”.

Yang berarti bahwa strategi mempunyai komponen pokok yaitu tujuan dan sasaran, cara bertindak dan alokasi sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁴

Bryson berpendapat, strategi dapat didefinisikan sebagai *“ a plan to achieve the mision and meet the mandats”* atau strategi merupakan suatu rencana untuk meraih misi dan melaksanakan mandat. Pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan maupun pengalokasian sumberdaya merupakan unsur yang menentukan apakah organisasi itu, apa yang dikerjakan dan mengapa mengerjakan hal tersebut.

Dengan demikian strategi ialah pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi tersebut dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan outline respon organisasi terhadap tantangan-tantangan maupun ancaman-ancaman mendasar yang dihadapi.

Hakikat dan Sifat Strategis ialah¹⁵:

- 1) Tujuan dan Sasaran.

¹⁴ Sumitro Djojohadikusuma, *Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta, 1987, hal 502

¹⁵ Kristanto Budi Astomo *“Manajemen Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar (Study kasus di Kantor Dinas P dan K Klaten)”* (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Ilmu Pemcrintahan, UMY, 2003), hal 16-17

- a. Tujuan adalah apa yang hendak dicapai di masa datang secara umum dan relatif tanpa batasan waktu.
- b. Sasaran adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah lebih terikat pada faktor waktu dan dapat diukur, dijumlahkan, dan dihitung.

2) Lingkungan

Sebagaimana layaknya manusia sebagai makhluk sosial, organisasi juga berinteraksi dengan lingkungan, tidak mungkin hidup secara terisolir dan organisasi juga dikendalikan oleh manusia. Apabila sasaran organisasi dapat mengatur lingkungannya, sebaliknya juga lingkungan dapat mengubah sasaran dari suatu organisasi.

3) Kapasitas Intern

Faktor ini meliputi struktur dan luasnya organisasi, sumber daya, program dan kegiatan, kepemimpinan dan lain-lain. Suatu organisasi dapat menilai kompetensi yang dimiliki untuk menentukan bagaimana cara berkompetisi dalam lingkungan ekstern.

4) Komunikasi

Strategi dapat berhasil jika komunikasi dilakukan dengan baik. Kesempatan atau peluang dalam lingkungan eksternal hanya bermanfaat bagi organisasi dan apabila hal itu berhasil kemudian dikomunikasikan secara efektif.

Suatu strategi di katakan efektif apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Strategi secara teknik harus dapat di laksanakan.
2. Secara politis strategi harus dapat di terima oleh para key stakeholders.
3. Strategi harus sesuai dengan nilai-nilai dan filosofi organisasi.
4. Strategi seyogyanya bersifat etis, legal, moral, dan merupakan keinginan organisasi untuk menjadi lebih baik.
5. Strategi harus sesuai dengan isu strategi yang hendak di pecahkan.

Menurut Siagian dan Rangkuti terdapat tiga level dalam strategi yaitu:

- a. Strategi tingkat korporasi; merupakan strategi yang mencakup semua kegiatan organisasi, termasuk beraneka bidang yang bersifat bisnis yang ditangani maupun yang bersifat fungsional.
- b. Strategi tingkat bidang satuan bisnis; strategi yang disusun berdasar strategi korporasi, yang cakupannya terbatas pada bidang bisnis yang ditangani namun lebih terperinci.
- c. Strategi tingkat fungsional; ialah strategi penjabaran lebih lanjut atas strategi bidang bisnis.

Satu prinsip dalam pengelolaan strategi yang sistematis adalah bahwa strategi yang lebih kecil adalah bagian dari dan selalu mengacu kepada strategi yang lebih besar.

2. Konsep Manajemen Strategis

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan yang diupayakan pada anggota-anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen

di definisikan sebagai aktivitas yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Pengertian manajemen menurut beberapa ahli ¹⁶:

1. James F. Stoner, mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan yang diupayakan pada anggota-anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Terry, mendefinisikan manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.
3. Miftah Thoha mengartikan manajemen sebagai aktivitas menggerakkan segenap orang dan mengarahkan semua fasilitas yang dipunyai oleh sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan elemen dasar manajemen meliputi :

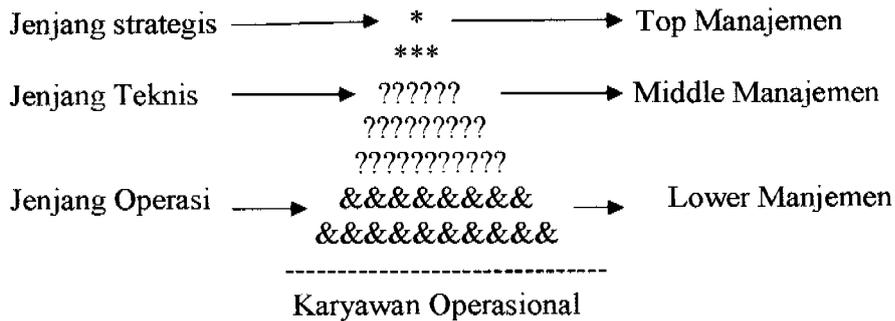
- a. Aktivitas,
- b. Melalui orang lain,
- c. Menggunakan sumber-sumber,
- d. Pencapaian tujuan,
- e. Berlangsung dalam suatu organisasi.

Adapun fungsi manajemen menurut G.R. Terry adalah *planning, organizing, actuating* dan *controlling*.

Dalam manajemen terdapat tiga tingkatan ¹⁷:

¹⁶ Atik Septi Winarsih, *Azaz-azaz Manajemen*, Diktat Kuliah, 2003, hal 1-2

Bagan 1.1
Bagan Jenjang Strategis



Prinsip-prinsip yang terdapat dalam manajemen menurut Henry Fayol¹⁸, yaitu: Pembagian kerja berdasarkan spesialisasi, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan arah, kesatuan perintah, sentralisasi, imbalan, hirarki, pengaturan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, keadilan, stabilitas dan kedudukan pegawai, inisiatif, dan semangat korps.

Strategi sendiri mempunyai pengertian sebagai pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan outline respon organisasi terhadap tantangan-tantangan maupun ancaman-ancaman mendasar yang dihadapi.

Dengan demikian manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis merupakan upaya untuk mengelola strategi suatu bisnis agar tercapai tujuan bisnis.¹⁹ Manajemen strategis atau yang juga di sebut perencanaan

¹⁷ Ibid, hal 7
¹⁸ Ibid, hal 9-12
¹⁹ Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Strategi*, BPFF, Yogyakarta, 2003, hal 1

strategis merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan mendasar yang mengarah pada apakah organisasi itu, apa yang di lakukannya dan mengapa melakukan itu.

Manajemen strategis juga memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu lembaga dapat berjalan menuju ke tujuan sesuai misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal, dalam rangka mengisi peluang dan menghindari ancaman yang ada atau yang datang dari lingkungan eksternal.

Terdapat lima langkah dalam manajemen strategi menurut Arthur A Thompson, Jr yaitu²⁰:

1. *Formulating a strategic vision of where organization is headed so as to provide long-term direction, delineate what kind of enterprise the company is trying to be come, and infuse the organization with a sense of purposeful action.*
2. *Setting objectives converting the strategic vision into specific performance outcomes for the company to achieve.*
3. *Crafting a strategy to achieve the desired outcome.*
4. *Implementing and executing the chosen strategy efficiently and effectively.*
5. *Evaluating performance and initiating corrective adjustments in vision, long-term direction, objectives, strategy, or execution in light of actual experience, changing conditions, new ideas, and new opportunities*

²⁰ Arthur A. Thompson, Jr and A. J. Strickland III, *Strategic Management Concepts and Cases*, New York, 2003, hal 6

Garis besar dari kelima langkah yang tertera diatas adalah bahwa dalam manajemen strategis di perlukan adanya formating visi atau tujuan organisasi, penentuan objek ataupun sasaran dari visi yang diformat, perumusan strategi yang tepat yang akan digunakan organisasi, implementasi strategi yang telah ada, kemudian yang terakhir berupa evaluasi terhadap pelaksanaan strategi yang kemudian menjadi acuan dalam perumusan strategi baru untuk memperbaiki kondisi yang ada dengan ide, sasaran, maupun visi baru dari organisasi yang akan lebih tepat guna.

a) Manfaat dan resiko Manajemen Strategis

Manajemen strategis diakui merupakan sarana keberhasilan suatu badan usaha.²¹ Manfaat manajemen strategis meliputi; mencegah timbulnya masalah karena segala sesuatu direncana dan dilaksanakan secara sistematis dan konsisten serta runtut, merupakan hasil kerja sama, melibatkan berbagai pihak terkait sehingga ada partisipasi sesama anggota dan ini menimbulkan pengertian, merupakan pengertian bersama, bila terjadi perubahan para anggota akan segera menyesuaikan diri karena memang masing-masing telah menghayati segala yang dibicarakan bersama.

Resiko yang kemungkinan dihadapi :

- a. Pembentukannya memerlukan dana dan waktu yang cukup besar.
- b. Kemungkinan timbul ketidakpedulian dari pihak yang tidak dilibatkan.
- c. Memerlukan pelatihan yang cukup mahal guna mengantisipasi masalah yang akan muncul.

²¹ Sukanto Reksodiprodjo, *Manajemen Strategi*, BPFE, Yogyakarta, 2003, hal 8-9

b) Tahap-tahap Manajemen Strategis.

Dalam manajemen strategis terdapat beberapa tahapan proses yaitu²²:

1. Identifikasi Mandat dan Misi Organisasi

Mandat merupakan apa yang diharuskan atau diwajibkan oleh pihak yang lebih tinggi otoritasnya, termasuk yang diharapkan dari masyarakat sendiri. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi atau lembaga didirikan. Dengan kata lain misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga, mengapa lembaga tersebut mengerjakan apa yang dikerjakan. Mandat dan misi inilah yang kemudian digunakan sebagai titik tolak dalam mengukur kinerja organisasi.

2. Analisis Lingkungan Strategis

Menurut Brayson untuk merespon secara efektif terhadap perubahan lingkungan organisasi publik harus memahami lingkungan internal dan eksternalnya, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi yang efektif guna mengkaitkan kedua lingkungan tersebut.

Pemahaman atas lingkungan internal berguna untuk mengetahui kelemahan (*weakness*) dan kekuatan (*strength*), sedangkan lingkungan eksternal untuk mengetahui ancaman (*threasts*) dan peluang (*opportunities*). Pemahaman atas kondisi kedua lingkungan tersebut

²² Budi Astomo Kristanto, "*Manajemen Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar (Study kasus di Kantor Dinas P dan K Klaten)*" (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Ilmu Pemerintahan, UMY, 2003), hal 22-24

digunakan sebagai pijakan dalam analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, threats). Untuk merumuskan isu strategis pada tahap analisis berikutnya.

Analisis lingkungan internal dilakukan terhadap :

- a. Sumber daya yang dimiliki (input) melalui : SDM, dana, sarana/fasilitas, struktur, dan budaya organisasi.
- b. Strategi yang sedang digunakan untuk mengelola input.
- c. Kinerja atau output yang dicapai saat ini.

Analisis lingkungan eksternal dilakukan melalui :

- a. Pemantauan terhadap ragam kecenderungan dan kekuatan-kekuatan politik, sosial, teknologi, fisik, dan pendidikan.
- b. Mengamati stakeholder luar yang berpengaruh seperti klien, pelanggan maupun para pembuat kebijakan.
- c. Mengamati competitor yang ada.

3. Analisis Isu Strategis

Pengidentifikasian isu strategis merupakan inti dari perencanaan strategis. Kerenanya isu strategis merupakan pertanyaan, kebijakan mendasar yang harus ditemukan jawabannya dalam upaya mewujudkan mandat dan misi organisasi. Dalam identifikasi isu strategis studi ini menggunakan pendekatan langsung dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mempelajari mandat dan misi
- b. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

c. Mengidentifikasi isu strategis.

4. Perumusan Strategi

Pada dasarnya strategi merupakan garis besar (out line) respon organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi. Oleh karena itu, strategi harus dirumuskan selaras dengan isu strategis yang telah didefinisikan.

Dalam perumusan strategi penanggulangan masalah putus sekolah ini dapat digunakan pendekatan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi alternatif-alternatif umum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu strategis.
- b. Mempelajari kendala-kendala yang kemungkinan muncul dalam pelaksanaan alternatif-alternatif umum tersebut.
- c. Merumuskan usulan-usulan utama yang dapat digunakan untuk mewujudkan alternatif-alternatif tersebut sekaligus mengantisipasi kemungkinan kendala-kendala yang akan dihadapi.
- d. Merumuskan kegiatan utama apa yang harus dilakukan dalam satu/dua tahun kedepan.
- e. Merumuskan langkah-langkah khusus yang harus dilakukan dalam enam bulan kedepan dan menetapkan siapa saja yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya.

3. DINAS DAERAH

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dalam pasal 62 dijelaskan bahwa:

- a) Dinas daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- b) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- c) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.²³

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dalam pasal 124 menyatakan bahwa:

- a) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah.
- b) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- c) Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.²⁴

Dalam pembaharuan yang terjadi dalam Undang-undang otonomi daerah dari no 22 tahun 1999 menjadi no 32 tahun 2004 terdapat pula perubahan dalam proses pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Kepala Daerah yang semula langsung kini menjadi lebih terstruktur yakni pertanggungjawaban dilakukan melalui Sekretaris Daerah, namun hal ini hanya sedikit mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh

²³ UU Otonomi Daerah no 22/99, Sendang Ilmu, Solo, 1999, hal 87-88

²⁴ UU Otonomi Daerah no 32 tahun 2004, Citra Umbara, Bandung, 2004, hal 105-106

dinas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Seperti masalah teknis untuk tingkat kabupaten/ kota sudah menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan kabupaten/ kota dan Dinas Pendidikan Propinsi hanya memfasilitasi dalam pembentukan kebijakan baru dalam bidang pendidikan.

4. PENDIDIKAN

Dalam pengertian yang sederhana dan umum maka definisi pendidikan ialah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai dan norma tersebut serta mewariskannya pada generasi berikutnya untuk di kembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Dengan kata lain pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup (nilai dan norma masyarakat) bangsa itu sendiri yang berfungsi sebagai filsafat pendidikan atau tujuan dan cita-cita pendidikannya. Sekaligus juga menunjukkan sesuatu bagaimana warga negara beserta bangsanya berfikir dan berperilaku secara turun menurun hingga kepada generasi berikutnya yang dalam perkembangannya akan sampai pada tingkat peradaban yang maju.²⁵

Pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional, dijadikan andalan utama untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia, dimana iman dan ketakwaan pada Tuhan Yang

²⁵ Ihsan Fuad Drs, *Dasar-Dasar Kependidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 3.

Maha Esa menjadi sumber motivasi yang utama. Pendidikan yang dikelola dengan tertib dan teratur, efisien dan efektif (berhasil dan berdaya guna) akan mampu mempercepat jalannya pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan bangsa sesuai dengan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam alenia IV, pembukaan UUD 1945.

Definisi pendidikan yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain ²⁶:

- b. Driyarkara mengatakan bahwa : pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ketaraf insan itulah yang di sebut mendidik. Pendidikan ialah pemanusiaan manusia muda (Ditjen Dikti, 1983/1984: 19).
- c. Dictionary of Education menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum (Ditjen Dikti, 1983/1984: 19).
- d. Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 menyebutkan : "*pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak, dalam Taman Siswa tidak boleh*

²⁶ Ibid, hal 4-5.

dipisah-pisahkan bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya”.

- e. Di dalam GBHN Tahun 1973 disebutkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

Dari uraian diatas, maka pendidikan dapat diartikan sebagai :

1. Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan;
2. Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak dalam pertumbuhannya;
3. Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat;
4. Suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju kedewasaan.

Dapat disebutkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah serta berlangsung seumur hidup. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, rasa, karsa, cipta, dan budi nurani) dan jasmani (Panca indra serta keterampilan-keterampilan).

2. Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita atau tujuan pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.
3. Pendidikan berarti pula hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangan manusia dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya.²⁷

Klasifikasi pendidikan menurut Philip H. Combs yang dikutip oleh St. Vembrianto ada tiga golongan yaitu²⁸ :

a. Pendidikan Formal

Yaitu pendidikan yang dilakukan secara sadar, teratur, bertingkat, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat, yang dimulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.

b. Pendidikan Non Formal

ialah pendidikan yang dilakukan teratur dan sadar tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat, yaitu kursus, penataran, seminar, lokakarya, dan diklat.

c. Pendidikan Informal

Yaitu pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari yang sadar atau tidak sadar sejak seseorang lahir sampai mati dari keluarga, pekerjaan atau pergaulan sehari-hari.

²⁷ Tim Dosen IKIP, *Dasar-Dasar Kependidikan*, IKIP Semarang Press, Semarang 1990, hal 5.

²⁸ Vembrianto, *Pendidikan Sosial*, Paramitra, 1981, hal 22-23.

Fungsi pendidikan dalam arti mikro ialah membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan fungsi pendidikan secara makro atau luas ialah sebagai alat :

- a. Pengembangan pribadi
- b. Pengembangan warga negara
- c. Pengembangan kebudayaan
- d. Pengembangan bangsa.²⁹

5. PUTUS SEKOLAH

Putus sekolah berasal dari kata putus yang berarti tidak berhubungan lagi³⁰ dan sekolah yang berarti lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran³¹. Sehingga putus sekolah dapat diartikan sebagai tidak berhubungan lagi dengan lembaga belajar dan mengajar. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia definisi putus sekolah ialah belum sampai tamat sekolahnya sudah keluar (dari sekolah).³²

Adapun faktor putus sekolah adalah *pertama*, faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu sehingga orangtua murid memutuskan sekolah anaknya karena ketidakmampuan membayar biaya sekolah anaknya, faktor inilah yang menjadi penyebab angka putus sekolah tinggi. *Kedua*, faktor budaya yang masih diterapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia yaitu menikahkan anak pada usia dini. Untuk

²⁹ Ibid, hal 11.

³⁰ *Kamus Populer*, Absolut, Yogyakarta, 2002, hal 615

³¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal 1013

³² Ibid, hal 803

tetap melestarikan tradisi yang telah di wariskan turun menurun tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang menikahkan anak-anaknya pada usia dini sehingga sebagian anak-anak tersebut terpaksa memutuskan pendidikannya atau bahkan sama sekali belum mengeyam pendidikan.³³

Dampak dari putus sekolah *pertama* generasi muda minim pendidikan formal sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan SDM (Sumber Daya Manusia) yang saat ini banyak dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan. *Kedua*, kemungkinan meningkatnya jumlah anak jalanan dan peningkatan angka kriminalitas seiring bertambahnya jumlah anak putus sekolah yang tidak mendapat pengarahannya dengan baik menimbulkan masalah sosial baru yang harus segera diatasi.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

Yaitu suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan.

1. Strategi

Suatu kebijakan yang menyeluruh mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan mempunyai

³³ Suryadi, *Profil Dunia Pendidikan di Saat Krisis Ekonomi*, Jurnal Dikbud No. 028, Maret 2001, hal 134-144

tiga komponen pokok yakni tujuan dan sasaran, cara bertindak, alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan.

2. Manajemen Strategis

Merupakan sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi ataupun sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.

3. Dinas Pendidikan

Suatu instansi pemerintah yang mengurus masalah pendidikan untuk melaksanakan urusan-urusan yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah.

4. Pendidikan

Adalah usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan.

5. Putus Sekolah

Merupakan keadaan dimana murid tidak dapat melanjutkan sekolahnya atau terpaksa keluar dari sekolahnya karena sebab-sebab tertentu.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.

1. Analisis potensi yang dimiliki Dinas Pendidikan Propinsi DIY
 - a. Mengetahui dan memaparkan kekuatan dan kelemahan Dinas Pendidikan
 - b. Mengetahui dan memaparkan peluang dan ancaman Dinas Pendidikan
2. Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Propinsi DIY dalam penanggulangan masalah putus sekolah.
3. Strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Propinsi DIY dalam penanggulangan masalah putus sekolah.

H. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntunan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut Winarno Surachmad metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yaitu dari kerja untuk memahami objek-objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.³⁴

1. JENIS PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian terdapat dua jenis penelitian yang sangat dominan yaitu penelitian kuantitatif dan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode statistik dalam pengajuannya,

³⁴ Kristanto Budi Astomo, "Manajemen Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar (Study kasus di Kantor Dinas P dan K Klaten)" (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Ilmu Pemerintahan, UMY, 2003), hal 35.

sedangkan jenis penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang tidak menggunakan metode statistik dalam pengajuan datanya.

Sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Winarso Surachmad penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan pada pemecahan masalah yang ada dimasa sekarang dengan berusaha mencari pemecahan melalui hubungan sebagai akibat yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan sesuatu atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.

Adapun ciri-ciri metode ini adalah :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang pada masalah-masalah aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis.³⁵

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memberikan suatu gambaran dari sifat-sifat individual, keadaan gejala, serta yang menerangkan sebab dari suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

2. UNIT ANALISIS

Dalam penelitian ini, unit analisis dapat diartikan sebagai obyek nyata yang akan diteliti, yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi permasalahan putus sekolah. Dalam

³⁵ Ibid, hal 36

penelitian ini yang dijadikan unit analisis adalah para staf dan karyawan beserta pimpinan Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan dan objek penelitian akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut ³⁶:

a. Interview atau wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab. Manfaat teknik ini adalah menjelaskan sedetil-detilnya mengenai pertanyaan yang diajukan. Sedangkan jenis interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu penulis datang mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman interview berisikan pokok-pokok permasalahan dalam pertanyaan terlampir.

b. Dokumentasi

Merupakan langkah yang ditempuh oleh penulis dalam mengumpulkan data-data melalui dokumen atau catatan yang tersedia di dalam suatu organisasi sesuai materi yang diambil.

Winarno Surachmad berpendapat bahwa dokumentasi merupakan laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut. Dengan perumusan tersebut kita dapat memasukkannya kedalam notulen rapat, majalah, iklan dan lain sebagainya.

³⁶ Ibid, hal 38-39

4. JENIS DATA

Karena data yang di gunakan adalah penelitian deskriptif, maka di butuhkan data penelitian primer dan sekunder. Dalam hal ini Winarno Surachmad berpendapat bahwa data primer adalah data yang telah terlebih dahulu di kumpulkan dan di laporkan orang luar dari penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan adalah sungguh data yang asli. Jenis data dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Data primer yaitu data langsung dari responden untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan putus sekolah.
- b. Data sekunder yaitu data yang telah di olah terlebih dahulu untuk memperoleh data dokumentasi mengenai kebijakan penanggulangan putus sekolah.

5. TEKNIK ANALISA DATA

Menurut Patton³⁷ analisa data merupakan proses mengatur, mengorganisasikan kedalam suatu pola, katagori, dan satuan uraian dasar. Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dibeda-bedakan menurut katagori untuk mendapatkan kesimpulan. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan obyektifitas terhadap penyajian laporan penelitian yang diperoleh dari wawancara serta dokumentasi.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal.103.

Tujuan dari analisis data pada dasarnya adalah upaya untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah dipahami. Karena skripsi ini jenis datanya ditumpukan pada hasil wawancara dan studi dokumentasi, maka analisa data dalam penelitian ini menggunakan model analisa kualitatif suatu usaha untuk mengambil kesimpulan berdasar pola pemikiran yang logis atas dasar perolehan data yang masuk sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Dalam penerapan metode ini pelaksanaan penelitian akan menyesuaikan dengan semua informasi, dokumentasi dan wawancara sesuai dengan kenyataan. Sehingga dapat dijelaskan proses analisis data yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber (wawancara dan dokumentasi)
- b. Setelah ditelaah data kemudian dilakukan reduksi untuk disusun kedalam satuan-satuan yang dikategorikan.
- c. Data disajikan secara tertulis berdasar kasus faktual yang terkait.
- d. Langkah terakhir yaitu menganalisa data yang ada dan memahaminya untuk menghasilkan kesimpulan sekaligus rekomendasi.³⁸

³⁸ Ibid, hal 105